

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Dampak Krisis Multidimensional bagi Keluarga, Wanita dan Anak.

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan tidak bisa ditawar lagi kehadirannya telah berpengaruh pula terhadap pola pikir, gaya hidup dan nilai-nilai serta orientasi manusia. Seperti digambarkan oleh Achmad Sanusi bahwa : masyarakat berkembang semakin kompetitif dan mengglobal dengan perubahan-perubahan dalam berbagai tingkat dan aspek yang amat pesat dan multilinier. Tujuan serta kepentingan, cara dan hubungan kerja dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat berikut masalah-masalahnya sungguh tidak lagi sederhana atau homogen apalagi uniform. Di samping rata-rata yang disepakati umum, ada rata-rata kelompok, dan dalam tiap rata-rata itupun ada nilai-nilai yang spesial atau unik (Sanusi, 1998 : 64).

Terjadinya perubahan sosial dalam dunia modern ini memang tidak dapat di sangkal lagi dan seringkali tidak dapat di tolak. Moore memberikan gambaran perubahan dalam suatu satuan generalisasi sebagai berikut: (1) Bagi masyarakat atau kebudayaan manapun perubahan cepat berlangsung, atau berlaku secara tetap. (2) Perubahan-perubahan itu tidaklah bersifat sementara maupun terpencil secara spasial, karena perubahan terjadi dalam rangkaian runtut bukan sebagai krisis sementara yang diikuti oleh masa rekonstruksi diam-diam, dan akibat perubahan cenderung bergema ke seluruh kawasan atau seluruh dunia. (3) Karena perubahan

semasa itu mungkin berlaku dan akibatnya bermakna di manapun, maka perubahan tersebut memiliki asas ganda. Moore menyebut sifat perubahan sosial merupakan “ the normality of change” (Garna, 1992 : 2).

Setiap manusia pasti mengalami perubahan, dalam kehidupan yang makin lama makin bersifat global, perubahan itu jelas akan dianggap sebagai sesuatu yang normal karena perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang cepat, sehingga krisis kehidupan di belahan bumi lain akan berakibat ke bagian lainnya. Krisis yang sedang melanda masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini bermula dari krisis moneter berkepanjangan yang dampaknya sangat dalam, bagi kehidupan keluarga khususnya wanita dan anak. Adanya kompleksitas masalah yang menghimpit bangsa beberapa tahun terakhir ini membuat kita sadar bahwa upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari kebutuhan fisik sampai kebutuhan aktualisasi diri bagi sebagian warga masyarakat sebagai suatu kegiatan yang harus di bayar mahal. Jika dilihat dari perubahan kehidupann manusia menurut Sudardja Adiwikarta (1997) dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu :

- a. Yang tidak berhasil menjawab tantangan kehidupan yang berubah. Mereka tersisih dari kehidupan, dan besar kemungkinan menjadi penghambat bagi upaya perubahan selanjutnya
- b. Yang berhasil menyesuaikan diri terhadap perubahan. Mereka bergerak dinamis mengikuti perubahan zaman. Biasanya mereka tergolong baik kehidupannya karena dapat mengambil keuntungan dari setiap situasi.
- c. Yang berhasil menciptakan perubahan dan mengendalikannya. Inilah orang-orang yang inovatif dan kreatif. Dalam kehidupannya memang banyak resiko

yang harus dihadapi. Tetapi orang inilah yang menjadi motor penggerak bagi masyarakat. Kebanyakan dari mereka menduduki posisi penting karena dipercaya orang lain bahwa mereka akan mampu membawa masyarakat. David Mc. Cleland menyebut semacam ini mempunyai "need for achievement" atau N-ach yang tinggi (Winner, 1998).

Dalam kenyataannya terdapat sekelompok masyarakat yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan, mereka itu adalah anak, khususnya anak dari keluarga miskin. Menurut ahli psikologi perkembangan anak (Elizabeth Harlock, 1993) bahwa pengalaman yang paling sulit dilepaskan dari memori manusia adalah apa yang diperolehnya pada masa kanak-kanak. Anak ibarat kertas putih, akan dijadikan apa nantinya sangat tergantung pada apa yang akan di tulis oleh lingkungannya. Dampak krisis yang telah melanda bangsa ini juga telah menyulitkan anak-anak untuk mewujudkan hak-haknya yaitu berkelangsungan hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi (KHA, 1990).

Dalam masa pembangunan jangka panjang pertama, atau 25 tahun belakangan ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal ini tercermin dalam angka kematian bayi (dari 145 menjadi 52 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita (dari 218 menjadi 78 per 1000), kenaikan pesat angka partisipasi anak dalam sekolah (95 %), dan pengurangan kemiskinan dari 60 % menjadi 14 % (BPS,1997). Tetapi kemajuan yang dicapai itu mengalami kemunduran cukup drastis sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang tengah melanda Indonesia, dengan angka partisipasi

sekolah diperkirakan akan menurun antara 8 – 16 % jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan diperkirakan bertambah paling kurang 50%. Semua ini membawa tantangan dalam bidang tumbuh kembang perlindungan anak pada saat Indonesia juga sedang memperjuangkan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan sumber daya manusia.

Pentingnya tindakan-tindakan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia lahir dari perkembangan pesat dan integrasi negara ke dalam “perekonomian dunia”, yang kemudian membawa perubahan-perubahan besar baik di kawasan ini maupun di Indonesia sendiri. Kekuatan-kekuatan perubahan yang sama pada masyarakat yang berorientasi pasar dan konsumsi tinggi, urbanisasi serta perluasan cepat sektor-sektor industri dan jasa juga telah mengakibatkan menurunnya pengaruh lembaga-lembaga pendukung seperti keluarga dan jaringan masyarakat serta telah menonjolkan kesenjangan-kesenjangan sosial, ekonomi, di dalamnya. Anak dan perempuan dari keluarga miskin, termasuk 5,3 juta keluarga yang dipimpin wanita (1990) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari transisi ekonomi dan sosial, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang sedang berlangsung.

Golongan-golongan anak yang dipandang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus adalah mereka yang terpaksa bekerja, dan khususnya yang bekerja dalam kondisi kerja membahayakan jiwa dan raganya, anak yang mengalami perlakuan salah atau eksploitasi seksual, dan anak yang kehilangan apakah sementara atau semala-lamanya pengasuhan orang tua, seperti anak jalanan, serta mereka yang menjadi korban dari sistem peradilan yang masih belum

memadai. Data kuantitatif ataupun kualitatif tentang golongan-golongan anak ini masih terbatas atau kurang lengkap, terutama untuk merumuskan kebijakan atau intervensi program yang tepat dan untuk menyediakan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Menurut BPS (1997) ada sekitar 2,1 juta anak berusia 10-14 tahun di Indonesia yang secara ekonomis aktif atau bekerja, dan hampir 1 juta atau 45 % diantaranya diperkirakan bekerja di pulau Jawa dan sebagian besar dalam sektor informal. Pekerjaan yang membahayakan yang dilakukan anak-anak dijumpai pada pekerjaan pemulung, melinting rokok, industri keramik, perikanan laut (jermal dan kapal laut), industri sepatu, dan sebagainya). Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan yang timbul, yaitu : selama kurun waktu 1986-1994 jumlah anak yang bekerja di daerah perkotaan bekerja lebih dari 45 jam perminggu, dan pekerjaan di sektor industri cenderung lebih eksploitatif sifatnya dibanding dengan sektor informal. Ada lebih dari 6,6 juta anak berusia 10-14 tahun yang tidak bersekolah. Perlindungan hukum bagi pekerja anak kurang memadai dan jarang ditegakkan oleh instansi bersangkutan. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk bekerja yang kemudian berdampak pada pelaksanaan yang lebih efektif dan pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional.

Laju cepat urbanisasi juga telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah anak rawan seperti anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seksual anak dan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, sekalipun belum ada data yang akurat. Menurut perkiraan tidak resmi, ada sekitar 50.000 anak jalanan, 2.500 anak tidak punya tempat tinggal dan 7000 anak yang berpindah –pindah tempat di kota-kota

besar Indonesia. Banyak di antaranya tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi dan rentan terhadap pelecehan fisik serta perlakuan seksual yang salah dan eksploitatif. Karena anak jalanan masih belum jelas statusnya, maka belum ada kebijakan atau intervensi program yang efektif untuk menangani masalah anak jalanan ini.

Jenis lain dari anak rawan adalah anak terlantar, angka-angka resmi memperkirakan adanya 3,5 juta anak yatim piatu dan terlantar, dan hanya sebagian kecil dapat dijangkau oleh pelayanan sosial. Seberapa jauh terjadi keterlantaran anak dalam keluarga belum diketahui. Kejadian kekerasan dan perlakuan salah seksual di dalam keluarga, khususnya terhadap perempuan dan anak, juga belum diketahui dengan pasti dan belum diakui secara resmi.

Anak-anak yang berurusan dengan pihak berwajib menurut perkiraan Departemen Sosial, berjumlah sekitar 150.000 (1993) anak dan remaja yang terlibat penyalahgunaan obat terlarang berjumlah 120.000 (1995). Remaja dan mahasiswa yang menggunakan obat-obatan psikotropis (narkoba, ekstasi dan sejenisnya) kini jumlahnya sekitar 2,5 juta orang yang terdeteksi. Menurut estimasi Hawari, Dadang (2000) dari satu orang pengguna memiliki jaringan atau pengikut sekitar 10 orang. Oleh karena itu bisa diperkirakan pengguna obat-obat terlarang kini sudah mencapai kurang lebih 20 juta orang kurang lebih 30% di dalamnya terdiri dari anak-anak termasuk juga pelajar dan mahasiswa. Hasil survey Yayasan Mesra di Kota Bandung terdapat kurang lebih 40 lokasi pengedar narkoba dan penggunaanya kurang lebih 5000 orang sekalipun baru sekitar 1500 orang yang terdeteksi.

Belum ada angka nasional yang pasti tentang eksploitasi seksual komersial

anak yang masih belum dianggap sebagai masalah di Indonesia. Tetapi, masalah itu tampak berkembang khususnya di kota-kota besar dan pusat-pusat wisata (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali, Lombok, dsb) dimana banyak terdapat lokalisasi penjaja seks dan melibatkan eksploitasi seksual anak-anak/remaja (pria dan wanita). Di Bandung kita kenal lokalisasi seperti Saritem, Sasakgantung, dan beberapa tempat terselubung lainnya, di Jakarta dengan Kramat Tunggaknya dan di Surabaya dengan Gang Dollynya, semua lokalisasi sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Dalam tahun 1995, Departemen Sosial memperkirakan bahwa 60 % dari 71 ribu lebih wanita tuna susila di pusat-pusat Rehabilitasi Pemerintah berusia antara 15 dan 20 tahun. Kepekaan anak-anak, khususnya gadis-gadis, yang berada dalam keadaan rentan itu terhadap kemungkinan tertular PMS/HIV/AIDS sangat tinggi pada kasus-kasus eksploitasi dan perlakuan salah seksual.

Ada beberapa kebiasaan tradisional yang berlangsung di beberapa daerah yang sering seolah-olah "membenarkan" perlakuan salah terhadap anak dan melanggar hak-hak mereka akan tumbuh kembang dan perlindungan. Ke dalamnya termasuk perkawinan usia muda, terutama di daerah pedesaan (misalnya di Jawa Barat dan Madura) dan di kalangan keluarga miskin, dengan hampir 25 % berlangsung pada anak perempuan dibawah usia 16 tahun (BPS 1990).

Dengan berkecamuknya "krisis moneter" yang diperkirakan akan berlangsung sampai lima tahun mendatang, berbagai keadaan digambarkan di atas akan bertambah buruk tanpa adanya suatu intervensi yang efektif untuk menangkalnya. Instrumen pokok untuk mencegah keadaan yang lebih parah dan memberi

perlindungan yang menyeluruh kepada anak adalah sosialisasi Konvensi Hak Anak yang di dalamnya memuat empat hak utama anak yaitu : hak untuk berkelangsungan hidup, memperoleh perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisipasi (KHA, 1990). Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, organisasi sosial sampai kepada aparat pemerintah. Kasus-kasus yang sering dialami oleh seperti kekerasan, perkosaan eksploitasi dan sebagainya biasanya terjadi karena pelaku tidak memahami substansi hak-hak anak yang harus dilindungi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian, kasih sayang dan perlindungan terhadap anak, tampaknya perlu di tanamkan kepada setiap orang. Anak-anak harus diselamatkan dari kemiskinan, keterbelakangan, tindak kekerasan serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka karena di atas pundak anaklah masa depan bangsa dipertaruhkan. Kepribadian anak yang mampu berpikir bebas, mandiri dan demokratis mutlak diperlukan. Membiarkan anak terkooptasi dari segala bentuk pendekatan yang menutup akses kepribadian yang bebas, mandiri dan demokratis berarti melecehkan hak asasi anak-anak yang bersangkutan.

Terwujudnya kondisi yang memenuhi kriteria anak seperti tersebut di atas tidak terlepas dari peranan lembaga pendidikan termasuk guru dan orang tua serta lingkungan baik keluarga maupun masyarakat. Namun di antaranya yang paling dominan berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian anak adalah keluarga. Mendidik anak di dalam keluarga mengacu pada falsafah apa yang ditanam itulah yang akan tumbuh. Selain unsur jasmani Imam Al-Gazali membagi potensi mental



spiritual manusia dalam 4 unsur, yaitu ruh, aqal, nafs dan qalb. Oleh karena itu dalam mendidik anak diperlukan sentuhan-sentuhan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan tingkat kedewasaan dan tujuan yang ingin dicapai, kognitif,afektif, psikomotorik atau kemampuan lainnya (Sanusi, 1998, :63).

Oleh karena itu kita sepakat bahwa tugas kependidikan tidak hanya dibebankan pada lembaga persekolahan saja, tetapi seluruh unsur yang ada di masyarakat termasuk organisasi sosial, kiai, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia di tengah krisis melalui pendidikan

Pada saat ini kita masih berada pada situasi dan kondisi krisis yang serius yaitu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan, mata pencaharian, kualitas lingkungan, hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual, suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial merupakan sumber terjadinya krisis tersebut dan Capra (1997, 11) menyebutnya sebagai krisis budaya.

Sorokin (1937) dikutip Capra (1997:20) meramalkan bahwa nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran inderawi mengalami kemunduran serta terjadinya perubahan paradigma dan pergolakan sosial yang kita saksikan dewasa ini. Ini menyiratkan secara kuat bahwa krisis yang kita hadapi dewasa ini bukanlah krisis biasa melainkan salah satu fase transisi besar sebagaimana yang telah terjadi pada siklus-siklus sejarah manusia sebelumnya. Transformasi yang kita alami saat ini mungkin

lebih dramatis daripada transformasi-transformasi yang pernah terjadi sebelumnya. Transformasi budaya sebesar dan sedalam ini tidak dapat dicegah, tetapi harus disambut dengan berbagai kesiapan, terutama pada kesiapan sumberdaya manusianya.

Perlunya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas juga diperkuat oleh Achmad Sanusi, 1998; Tilaar, 1998; Anwar Idochi 1999, Unicef, 1998 tentang bagaimana menyikapi era globalisasi dengan meningkatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Bahwa pada abad 21 ini merupakan awal kehidupan baru bagi bangsa-bangsa di dunia khususnya bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya suatu masyarakat terbuka dan menyatu, yang berarti tidak ada batas lagi antar negara. Proses demokratisasi kini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakat, mereka mulai menyadari hak dan kewajibannya. Dalam aspek kebudayaan juga telah terjadi pengaruh kebudayaan dunia yang sulit untuk ditolak kehadirannya, semua ini terjadi karena peran kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi yang menyebabkan manusia hidup dalam dunia yang tanpa batas serba transparan dan tidak ada ruang yang terisolasi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara eksponensial akan mengubah dengan cepat gaya dan kehidupan manusia, bahkan mungkin menuntut percepatan dan loncatan yang kita kenal dengan transformasi masyarakat secara total. Sanggup tidaknya masyarakat melakukan itu semua tergantung pada manusia yang mendukung masyarakat tersebut.

Kita menyadari betapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia Indonesia apabila dihubungkan dengan potensi ekonomi dunia yang dimiliki oleh



bangsa Indonesia. Kemampuan bersaing dengan bangsa lain dalam berbagai bidang tersebut tidak dapat dicapai apabila sejak sekarang SDM Indonesia tidak mendapat prioritas pengembangannya. Selain itu proses globalisasi tidak dapat diabaikan oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini. Tidak ada satupun manusia, masyarakat bangsa yang luput dari pengaruh globalisasi. Di dalam menanggapi pergolakan moneter Asia Selatan akhir-akhir ini seperti dikutip oleh Tilaar (1998 : 39) mengutip Enrique Subercaseux, Direktur Pacific Economic Cooperation menyatakan, bahwa bangsa-bangsa khususnya di Asia Pasific perlu mempunyai "outward and forward looking". Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia bukan hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa kita, tetapi juga pandangan kita ke luar dan ke depan karena masyarakat dan bangsa kita adalah sebagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin menyatu.

Pendidikan sebagai bagian dari usaha kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional. Menghadapi perubahan-perubahan dalam era reformasi serta proses globalisasi yang juga mempengaruhi kehidupan nasional kita, maka kita memerlukan visi dan rencana pendidikan yang lebih terarah. Visi dan rencana yang terarah tersebut tidak lain daripada visi dan rencana strategis pendidikan nasional. Dalam rangka menyusun visi dan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional tersebut maka diperlukan suatu pemahaman mengenai peta permasalahan pendidikan saat ini.

Inti pembangunan pendidikan nasional adalah upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka mempersiapkan masyarakat dan bangsa kita menghadapi milenium ketiga sebagai bangsa yang kompetitif. Dalam rangka mencapai



tujuan tersebut maka manajemen pendidikan nasional yang efisien, profesional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional khususnya ketahanan anak, wanita dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Era reformasi mengharuskan kita mencari paradigma baru mengenai pendidikan seumur hidup, terlebih-lebih dengan masuknya teknologi informasi yang semakin canggih dan permasalahan pendidikan yang semakin kompleks seperti jumlah "*drop out*" yang makin banyak mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang jumlahnya jurang lebih 7,2 juta orang (Unicef, 1999). Dengan demikian sebagai suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional.

Pengembangan sumber daya manusia pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas yang pada gilirannya akan dapat tercipta masyarakat yang mandiri dalam PIPS dikenal dengan "*good citizens*". Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu berhasil tidaknya tujuan pembangunan, baik secara makro maupun mikro. Dalam konteks mikro, SDM juga diperlukan oleh setiap institusi kemasyarakatan dan organisasi sosial. Berbagai institusi kemasyarakatan seperti institusi keluarga, institusi kesejahteraan sosial, institusi politik dan keagamaan, SDM merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pengembangannya, terutama bila diinginkan pencapaian tujuan yang optimal. Bila tujuan akhir setiap kegiatan pembangunan baik dalam konteks makro maupun mikro adalah peningkatan taraf hidup, maka optimalisasi pencapaian tujuan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara optimal. Berdasarkan konsep di atas, dukungan SDM yang berkualitas sangat menentukan

keberhasilan yang optimal dari pencapaian tujuan tersebut.

Pengembangan SDM merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan, dengan menggunakan serangkaian teknik dan strategi belajar yang relevan (Megginson, Joy Mattews dan Bandfield, 1993 dalam Ali 1999). Konsep ini mengandung makna adanya berbagai unsur kegiatan selama terjadinya proses mengubah perilaku, adanya unsur belajar, dan perkembangan. Unsur pendidikan dimaksudkan untuk menentukan teknik strategi yang relevan untuk mengubah perilaku. Unsur belajar dimaksudkan untuk menggambarkan proses terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungan, termasuk dengan pendidik. Adapun unsur perkembangan dimaksudkan sebagai proses gradual dalam perubahan dari suatu keadaan, misalnya dari keadaan tidak dimilikinya kompetensi menjadi keadaan dimilikinya kompetensi, yang terjadi dalam waktu tertentu.

Menurut Gilley dan Egglan (1989), pengembangan SDM mempunyai *tiga* misi yaitu, *pertama*, untuk memungkinkan terjadinya proses perkembangan individu, terutama terfokus pada peningkatan kinerja yang terkait dengan pekerjaan yang ditangani. *Kedua*, menyiapkan pengembangan karir yang terfokus pada peningkatan kinerja yang terkait dengan penugasan dalam jabatan di masa yang akan datang. *Ketiga*, menyediakan pengembangan organisasi yang menghasilkan penggunaan potensi manusia dan kinerjanya yang meningkat. Jadi pada intinya pengembangan SDM terkait dengan pemanfaatannya dalam pembangunan sebagai upaya melakukan perubahan ke arah perbaikan yang

bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas SDM. Makna dari konsep ini adalah bahwa perubahan yang diupayakan melalui pembangunan bukan hanya menjangkau segi-segi material saja, tetapi juga seluruh aspek kehidupan seperti pendidikan, agama, sosial-budaya dan keamanan. Oleh karena itu agar masyarakat merasa memiliki, bertanggungjawab dan bisa menikmati hasil-hasil yang dicapai mereka perlu di dorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan pendidikan karena semua aspek kehidupan tersebut bermuara pada pendidikan.

Era reformasi menuntut kerja keras dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, apalagi arah kebijakan kini lebih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial. Selain itu tanpa partisipasi masyarakat maka tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekalipun upaya mendorong partisipasi akhir-akhir ini tidaklah mudah, karena masyarakat sudah terlalu lama berada pada kondisi tertekan dan tidak kondusif untuk tumbuhnya partisipasi sosial (Soelaiman, 1993). Proses pembangunan adalah proses sosial untuk menjadikan SDM lebih kompeten dan unggul dalam kancah persaingan global dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu perlu perencanaan program pendidikan yang terpadu tidak saja bagi masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan bahkan bagi masyarakat marginal. Program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah mengingat kemampuannya yang semakin terbatas, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara umum.

Mengingat dimensi berbagai krisis yang melanda Indonesia dan membuat

semakin terpuruknya kualitas SDM kita, ini menuntut perbaikan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik, terbuka dan demokratis, lebih sejahtera dan merata serta menghargai hak asasi manusia. Sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bidang kehidupan masyarakat perlu direformasi agar dapat mendukung segala usaha pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku dan tujuan akhir dari program reformasi itu sendiri. Kita memerlukan visi dan rencana pendidikan yang lebih terarah yaitu visi dan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional.

3. Meningkatkan Peranan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Guna Mengatasi Masalah Sosial .

Kita baru saja disadarkan oleh terjadinya berbagai problema bangsa ini yang diawali dari keterpurukan keuangan dan ekonomi yang akhirnya merembes ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Ini suatu bukti bahwa kita perlu mengadakan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam membangun suatu bangsa. Pertama-tama, pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan masyarakat; kedua, pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada satu aspek, misalnya pertumbuhan ekonomi yang selama Orde Baru menjadi prioritas perencanaan pembangunan. Namun menurut Ali Khomsan ternyata pembangunan ekonomi tersebut tidak bisa meningkatkan kualitas manusianya (Kompas, 29-2~~9~~-2000). Oleh karena itu pendidikan nasional perlu direformasikan dalam rangka untuk menciptakan suatu masyarakat yang berkualitas.

Dalam masyarakat demokratis setiap anggota masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri dan bukan oleh kekuasaan absolut. Masyarakat yang

berdaya adalah masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat madani atau *civil society*, suatu masyarakat yang sudah menyadari hak-hak dan kewajiban mereka, disisi lain terjadi pengurangan peran, campur tangan dan kekuasaan pemerintah dalam kegiatan masyarakat. Dengan demikian masyarakat madani diberi otonomi penuh dan bermuara kepada persatuan dan kesatuan bangsa dan kesejahteraan sosial yang merata.

Tilaar (1998 : 26-28) membuat peta permasalahan pendidikan dewasa ini yang tidak terlepas dari keseluruhan sistem politik, ekonomi, budaya dan hukum yang berlaku. Dikatakannya bahwa pendidikan nasional telah terperangkap di dalam sistem kehidupan yang opresif sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat banyak. Kelompok-kelompok masalah tersebut adalah : *menurunnya akhlak dan moral peserta didik, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, masih rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan dan pelatihan, kelembagaan pendidikan dan pelatihan, manajemen pendidikan dan pelatihan nasional masyarakat postindustry*. Dengan kata lain hasil pendidikan belum sejalan dengan manajemen pembangunan nasional, atau SDM yang belum profesional.

Di samping peta permasalahan tersebut perkembangan ilmu pengetahuan secara eksponensial akan mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia, bukan tidak mungkin menuntut loncatan-loncatan dalam pola dan daya kehidupan dari masyarakat prehistoris kepada suatu masyarakat post-industry.

Dengan kata lain transformasi sosial dewasa ini telah menghadapi suatu fase yang sangat menentukan karena berakselerasi dengan sangat cepat, di dalam keadaan demikian memungkinkan manusia terlempar dari proses perubahan disebabkan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, narkoba dan anak jalanan.

Pernyataan Tilaar diperkuat oleh Holil Soelaiman (PR, 8/2-2001) bahwa pendidikan kita sudah banyak mengalami berbagai distorsi dan hipokrisi yang indikasinya bisa kita rasakan akhir akhir ini seperti unjuk rasa dan kerusuhan diberbagai daerah, tawuran antar pelajar dan antar penduduk, pengrusakan tempat-tempat ibadah, kasus bom di beberapa lokasi serta sering cekcoknya para elit politik hingga membuat resah masyarakat. Sulit kita mencari figur teladan dan model peran yang memiliki keunggulan intelektualitas, emosionalitas moralitas, sosiabilitas, kejujuran, integritas, kepemimpinan serta pengabdian kepada bangsa dan kemanusiaan. Para elit politik dan para pejabat tinggi negara belum menunjukkan sense of crisis, kemauan, komitmen dan kereriusan untuk segera mengantaskan bangsa ini dari kemelut yang tidak kunjung selesai. Ini berarti para elit politik sedang memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak peka terhadap nasib rakyat kecil.

Sampai abad ke dua puluh satu pendidikan tetap masih menjadi keprihatinan kita yang utama, apalagi jika melihat kondisi bangsa kita yang makin terpuruk, berbagai persoalan bangsa seperti ekonomi, keamanan, politik, budaya tidak kunjung pulih. Para elit politik masih sibuk dengan memperebutkan kekuasaan pribadi dan kelompoknya, sementara rakyat kecil makin terhimpit dengan

ketidakberdayaan, orang sering mengkambinghitamkan semua persoalan bangsa ini bermuara pada sistem pendidikan. Sindunata (2000 : 5) melemparkan beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan, bagaimana kita para pendidik, lembaga pendidikan dan siapapun mesti menyikapi persoalan kemajemukan di negara yang sedang belajar demokrasi ini? Bagaimana pula dunia pendidikan menghadapi arus globalisasi yang sudah merembes masuk di setiap sudut kehidupan masyarakat kita? Gambaran manusia macam apakah yang mesti diperjuangkan dalam pendidikan agar anak didik menjadi manusia yang bebas, mandiri, toleran, solider, dan bertanggung jawab? Bagaimana kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dapat membantu proses pemekaran pribadi anak didik sehingga tidak kehilangan identitasnya di tengah masyarakat global? Selanjutnya, bagaimana lembaga pendidikan di daerah-daerah dapat menyikapi berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah?

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai suatu disiplin yang diorganisir dan disajikan secara psikologis untuk tujuan pendidikan mempunyai peran utama untuk mewujudkan transformasi sosial tersebut. Yang diorganisir dalam pendidikan ilmu sosial adalah berbagai disiplin ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, arkeologi, hukum, filsafat, politik, agama dan sosiologi. Tujuan utama pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dalam membuat keputusan didasarkan informasi yang lengkap sebagai warga negara yang baik dan berbudaya demi terciptanya masyarakat demokratik dan mandiri (Somantri, 1999).

Berpijak pada peta permasalahan pendidikan yang berdampak pada semakin

kompleksnya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat sebagai akibat perubahan sosial yang teramat cepat, maka pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki peran strategis bagi terwujudnya cita-cita bersama yaitu terbentuknya masyarakat madani melalui pembentukan good citizens. Sekalipun banyak hal yang harus dibenahi mulai dari paradigmanya, kurikulumnya sampai kepada implementasinya baik di sekolah maupun di masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Sanusi (1998 : 217) kita perlu melakukan “*repositioning*” dengan membuat analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang strategis.

Yang perlu dilakukan dalam *repositioning* tidak terlepas dari penegasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanannya. Setiap jenjang program studi perlu secara tegas menunjukkan kekhasan unggulnya, keunikannya yang disebut sebagai “*strong points*”.

Perkembangan pendidikan ilmu sosial di Indonesia tidak seperti bidang studi lainnya mengalami beberapa kendala antara lain : kurang jelas dipahami oleh siswa, kurangnya transfer informasi dan bahan bacaan, peranan buku teks dan dominannya guru, tidak disenangi dan membosankan, kurang relevan dengan kebutuhan/kenyataan, sikap negatif dan kurang percaya diri (Sanusi, 1998 : 218-225).

Selain itu Hasan (1996) mengemukakan bahwa perkembangan kurikulum di PIPS di Indonesia menunjukkan posisi yang berbeda selama masa 30 tahun terakhir mulai kurikulum 1964 sampai dengan kurikulum 1994 pendidikan ilmu-ilmu sosial SMP hanya terdiri dari disiplin Sejarah dan Geografi dengan pendekatan pengajaran disiplin ilmu yang terpisah (*separated disciplinary approach*).

Demikian pula pendekatan terpisah ini juga terjadi pada pengajaran ilmu-ilmu sosial di SMA sekalipun ada penambahan bidang studi yaitu Sejarah, Geografi dan Ekonomi. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan kurikulum sebelumnya, demikian seterusnya sampai kurikulum 1994. Perkembangan kurikulum PIPS dari waktu ke waktu merupakan indikasi bahwa ada perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Tyler : 1964, Taba : 1963, Tanner : 1984 dalam Hasan,1996). Tuntutan masyarakat itu harus diidentifikasi para pengembang kurikulum dan dikembangkan baik dalam bentuk tujuan, isi maupun proses belajar. Tuntutan masyarakat bisa diketahui melalui hasil survey, pengamatan dan penelitian. Oleh karena itu pengelola pendidikan khususnya pendidikan IPS harus selalu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, sebagai bahan masukan pengkajian kurikulum. Dimensi-dimensi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan hankamnas menjadi acuan yang dipersyaratkan dalam pengembangan kurikulum.

Para pakar PIPS perlu peka mengamati perubahan sosial yang terjadi di luar dan menyadari bahwa pembangunan masyarakat yang pesat selalu membawa dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan berbagai aspek kehidupan menuntut masyarakat dan anggotanya untuk memiliki nilai dan norma baru yang mungkin berbeda dan bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini anggota masyarakat itu sebagai individu ataupun kelompok. Perpindahan nilai dan norma dari yang lama ke yang baru memerlukan adaptasi dan asimilasi yang tidak selalu dapat dilakukan secara mulus oleh setiap anggota dan kelompok masyarakat. Sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bisa beradaptasi tanpa masalah tetapi sebagian lagi tidak dapat melakukannya dengan baik. Terjadi gejolak sosial

dan psikologis yang akan memberikan peluang untuk terjadi ketidak seimbangan dan ketimpangan sosial. Untuk itu diperlukan berbagai kepakaran dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi. Ekonomi, psikologi, sejarah dan pendidikan (Hasan : 1996). Dengan demikian jelaslah bahwa peran pendidikan ilmu pengetahuan sosial semakin diperlukan kehadirannya seiring dengan perubahan sosial yang semakin cepat.

Peran pendidikan IPS jelas semakin diperlukan tidak saja di lembaga formal seperti sekolah, lembaga kursus, pesantren juga diperlukan bagi masyarakat pada umumnya seperti anak, remaja, keluarga, organisasi sosial dan masyarakat luas.

Jika kita mengacu pada definisi anak menurut Konvensi Hak Anak bahwa usia anak antara 6-18 tahun, maka pendidikan IPS bagi anak harus berbeda dengan pendidikan IPS bagi remaja (15-21 tahun). Selain perbedaan usia anak juga perbedaan kepribadian antara anak-anak yang berada di sekolah dengan anak-anak rawan juga perlu dipertimbangkan bagi perencanaan kurikulum di masyarakat. Idealnya rencana kurikulum PIPS di sesuaikan dengan kebutuhan/ permasalahan anak sebagai “user” dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar (lapangan kerja atau lembaga keterampilan yang tersedia di masyarakat atau dikembalikan kepada orang tuanya).

4. Fenomena permasalahan anak , ancaman terjadinya “lost generation”

Anak adalah aset bangsa yang paling berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat-zat gizi, pakaian, kesehatan, pendidikan,



bermain, kasih sayang, moral dan sebagainya. Ini semua bisa dipenuhi oleh anak manakala lingkungannya terutama lingkungan terdekatnya kondusif bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak. Selain itu anak diibaratkan sebagai kertas putih yang sangat tergantung pada tinta apa yang akan ditorehkan oleh lingkungan kepadanya.

Krisis ekonomi yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana telah menyebabkan banyak orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, menurunnya daya beli serta melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan anak. Akibat lebih jauh lagi adalah banyaknya anak-anak yang terpaksa meninggalkan sekolah guna mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Jumlah anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) menurut Mendiknas Yahya A. Muhaimin, meningkat dari 1.198.000 di tahun 1997 menjadi 1.562.000 di tahun 1998. Wajib belajar 9 tahun sulit dicapai, terlebih-lebih lagi dengan semakin kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Unicef (1999) mengungkapkan bahwa paling sedikit 6 juta anak yang berusia di bawah 15 tahun terpaksa bekerja, termasuk sebagai pekerja sex, di awal tahun 1999. Mereka banyak yang terpaksa bekerja baik di jermal, pasar, pabrik, dijalanan maupun sebagai pembantu rumah tangga yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan kesewenangan dari lingkungan. Menurut hasil penelitian Unicef – Atmajaya (1998), bahwa kekerasan yang dialami baik berupa kekerasan fisik, emosional maupun seksual mayoritas dilakukan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, orang tua, guru, bahkan aparat setempat.

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional 1998, sekitar 33,3% balita terancam tumbuh kembangnya karena menderita gizi buruk. Unicef memperkirakan anak penderita kekurangan energi dan protein (KEP) di Indonesia akan mencapai 10 juta jiwa, sekitar satu juta di antaranya penderita KEP berat, sedangkan di Kabupaten Bandung balita yang bergizi buruk 2,24 % dan bergizi kurang 12,4% (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2000). Sedangkan data di Dinas Sosial Kabupaten Bandung (2000) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah anak terlantar dari 13.411 orang, anak nakal 911 orang dan 4117 anak jalanan pada tahun 1998/1999 menjadi 31964 anak terlantar, 3971 anak nakal dan 11.750 anak jalanan. Suatu fenomena permasalahan anak yang cukup membuat kita terpana karena akan berakibat pada hilangnya satu generasi (lost generation) yaitu suatu situasi yang dikhawatirkan akan menyebabkan tercipta generasi yang kualitasnya jauh dari harapan seperti banyaknya masalah-masalah yang dirasakan mereka seperti: malnutrition, drop out, narkoba dan kriminalitas lainnya. Belum lagi masalah penyalahgunaan narkoba yang hampir setiap hari kita lihat beritanya di mass media. Pada tahun 1998, 24,3% pemakainya adalah pelajar dan mahasiswa dan pada tahun 2000 jumlah mahasiswa yang terlibat narkoba 25.000 orang (PR, 5/1-2001), mereka ini adalah manusia pilihan yang sudah terseleksi. Dengan demikian semakin kecil lagi jumlah penerus bangsa yang bisa diandalkan sebagai tumpuan masa depan bangsa Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai kebutuhan hidup

yang perlu dipenuhi. Anak-anak adalah manusia kecil yang belum dewasa. Jiwa dan raganya, serta kepribadiannya sedang tumbuh, dan jika mengalami kekurangan dalam proses perkembangannya, meski bersifat sementara sekalipun, dapat menimbulkan kerusakan sepanjang hidup serta kelainan pada tumbuh kembangnya. Pada sisi lain, anak merupakan aset masa depan bangsa yang memerlukan dorongan dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar, sehingga ia mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Peluang untuk tumbuh kembang tersebut perlu ditopang oleh adanya situasi yang memungkinkan anak mampu mempersiapkan diri di masa depannya.

Munculnya berbagai persoalan yang dihadapi anak rawan/ anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak jalanan, buruh anak, eksploitasi seksual anak, gizi rendah, anak korban kekerasan dan anak yang berkonflik dengan hukum, telah menyadarkan kita bahwa kita akan kehilangan generasi penerus (lost generation) yang memerlukan pemikiran serius. Permasalahan anak tersebut tidak terlepas dari lingkungan atau sistem yang terkait terutama lingkungan terdekat yaitu keluarganya. Jika meminjam istilah Irwanto (1999) " Dalam keadaan tak berdaya, keluarga membiarkan anak atau mendorong anak untuk bekerja dalam usia dini baik pada sektor industri, pertanian, perkebunan maupun di jalanan sebagai pedagang asong. Kondisi tersebut lebih menyedihkan tatkala keluarga tidak mempunyai modal berdagang, sehingga anak berada di jalan untuk mempertankan hidup dengan segala cara".

Anak-anak rawan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai fokus penelitian ini menderita kerugian dalam mendapat kesempatan tumbuh

tujuan pendidikan selain mempunyai sasaran peserta didik di sekolah juga mempunyai sasaran di masyarakat seperti anak rawan (Sanusi, 1998, Somantri, 1999 : 3). Tujuan PIPS di masyarakat adalah membantu pertumbuhan anak menjadi dewasa sebagai warganegara yang baik melalui pengorganisasian berbagai disiplin ilmu sosial.

Jika kita melihat karakter beberapa ilmu yakni : Ilmu sebagai produk, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai alat komunikasi, maka ilmu Pekerjaan Sosial sebagai salah satu jenis ilmu sebagai praktik komunikasi dan juga sebagai “Applied Science” dan sebagai profesi pertolongan. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pertolongan merupakan bagian dari pendidikan IPS yang berusaha mendayagunakan semua kekuatan manusia bagi pemenuhan kebutuhan perorangan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pekerjaan sosial dalam praktiknya selalu berhubungan dengan individu, kelompok, keluarga, organisasi sosial dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau mengalami masalah sosial. Di dalam praktiknya pekerjaan sosial menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai dasar analisisnya seperti filsafat sosiologi, psikologi, dan antropologi. Oleh karena itu hasil penelitian ini juga menggunakan ilmu Pekerjaan Sosial sebagai pisau analisisnya.

Dari fenomena tersebut bisa dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kehidupan anak rawan di Bandung dari aspek ekonomi, sosial-budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan faktor penyebabnya ?
2. Kebutuhan dan masalah sosial apa saja yang di rasakan ?
3. Program dan pelayanan sosial apa saja yang telah mereka terima ?

4. Bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah-masalah baik individu maupun kelompok dan keluarganya ?
5. Bagaimana implementasi pendidikan IPS bagi anak rawan melalui model pendekatan terpadu/ holistik/ terintegrasi ?

C. KERANGKA BERPIKIR

Perubahan sosial yang terjadi berlaku pada setiap anggota masyarakat, setiap saat dimanapun mereka hidup dan berada. Kadangkala perubahan secara tiba-tiba dan serentak, kadangkala berlangsung secara lambat dan sukar diterima masyarakat, bahkan masyarakat seringkali tidak sadar bahwa perubahan telah melanda kehidupan mereka. Perubahan sosial bukanlah gejala modern yang istimewa, walaupun pada masa ini berlangsung berbagai krisis kehidupan manusia. Beberapa jenis dan derajat perubahan sebenarnya di alami manusia seperti pola pikir, struktur dan nilai (Moore, dalam Garna, 1992).

Kita menyadari bahwa sejak situasi krisis melanda Indonesia salah satu dampak yang merisaukan adalah makin bertambahnya besaran permasalahan anak-anak rawan. Indonesia telah merosot kembali menjadi negara miskin di dunia. Pendapatan per kapita yang sebelum krisis sekitar 1000 AS dollar merosot tajam menjadi sekitar 400 AS dollar pada akhir tahun 1998.. Tingkat kemiskinan yang semula mengalami perbaikan dan mendekati angka 20 juta ternyata kemudian melonjak beberapa kali lipat kembali akibat munculnya orang-orang miskin "baru". Menurut *World Bank* diperkirakan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi 14,1 % pada tahun 1999 atau ekuivalen dengan munculnya 29 juta

penduduk miskin baru. Sementara itu menurut perhitungan *Asian Development Bank* diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah jauh lebih banyak lagi yakni sekitar 50 juta orang, sehingga secara keseluruhan menjadi 80-100 juta atau mendekati 50 % dari total jumlah populasi (Soemardjan(ed), 1999 : 93:94). Anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak transisi ekonomi dan sosial yang tengah berlangsung. Data anak di BPS, 1996 menyebutkan bahwa anak usia 0 – 19 tahun mencapai 44 % atau 85 Juta. Dari jumlah tersebut terdapat kurang lebih 10 % yang terlantar (Dep. Sos, 1997). Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk : (1) berkelangsungan hidup, (2) memperoleh perlindungan, (3) tumbuh kembang, dan (4) berpartisipasi. Apabila anak tidak mendapatkan hak-hak tersebut dari lingkungannya, tentu ada pihak yang melakukan kesalahan dan memerlukan penanggulangan.

Di bidang kesehatan, diperkirakan jumlah kasus anak-anak yang kekurangan gizi melonjak lebih dari 73%. Rata-rata setiap hari muncul sekitar 440 kasus baru busung lapar. Pada akhir tahun 1998 saja telah ditemukan sekitar 10-12 juta balita kekurangan gizi. Yang paling mengesankan, 4 juta di antaranya berusia 2 tahun. Di bidang pendidikan, Bank Dunia memprediksi jumlah anak putus sekolah di Indonesia tahun 1998/1999 mencapai angka 4,5 juta siswa. Bahkan Bappenas sendiri memperkirakan angka yang lebih besar, yaitu sekitar 6,5 juta anak. Dan, yang memprihatinkan, bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah, adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kendati kebiasaan untuk

melatih anak bekerja sejak dini bukan hal baru, tetapi sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 lalu, diperkirakan angkanya melonjak cukup besar. Dari data BPS diketahui, jika pada bulan Agustus 1997 pekerja anak yang masih bersekolah berjumlah 59,3 %, maka pada Desember 1998 di antara mereka bersekolah telah berkurang menjadi 51,6 %. Untuk pekerja anak usia 10-14 tahun, mereka yang bersekolah telah menurun 8 % dalam satu setengah tahun terakhir. Sedangkan untuk pekerja anak usia 5-9 tahun, bila pada Pebruari 1998 masih lebih dari 80 % yang bersekolah, maka pada Desember 1998 mereka yang tetap bersekolah menurun menjadi 68,6 % untuk anak laki-laki dan 74,1 % untuk pekerja anak perempuan (Imawan, 1999).

Penelitian PPPP UGM – UNICEF (1999), "A Focused Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia" didasarkan oleh asumsi : (1) berbagai macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak terwujud begitu saja. Berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak muncul dalam suatu konteks sosial budaya tertentu yang memiliki unsur-unsur pendukung bagi keberadaan gejala kekerasan tersebut, (2) bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan pelakunya sedikit banyak tergantung pada konteks atau setting tempat terjadinya kekerasan itu, (3) sebagai makhluk sosial setiap orang pada dasarnya telah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan. Sedangkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hampir 100 % anak jalanan mengalami kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, maupun di masyarakat. Jenis kekerasan tersebut antara lain berupa kekerasan fisik, psikososial, mental dan seksual.

Kekerasan pada anak biasanya berkaitan dengan menelantarkan anak atau dikenal dengan istilah "*child abuse atau child neglect*". Tindak kekerasan ini bisa berupa : kekerasan fisik, seksual dan emosional. Sedangkan tempat terjadinya perlakuan salah ini meliputi : (1) rumah, (2) institusi, (3) tempat kerja (4) tempat umum. Perlakuan salah ini dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di masing-masing tempat, terutama dari orang yang lebih dewasa, dan produk dari perlakuan salah ini adalah anak jalanan.

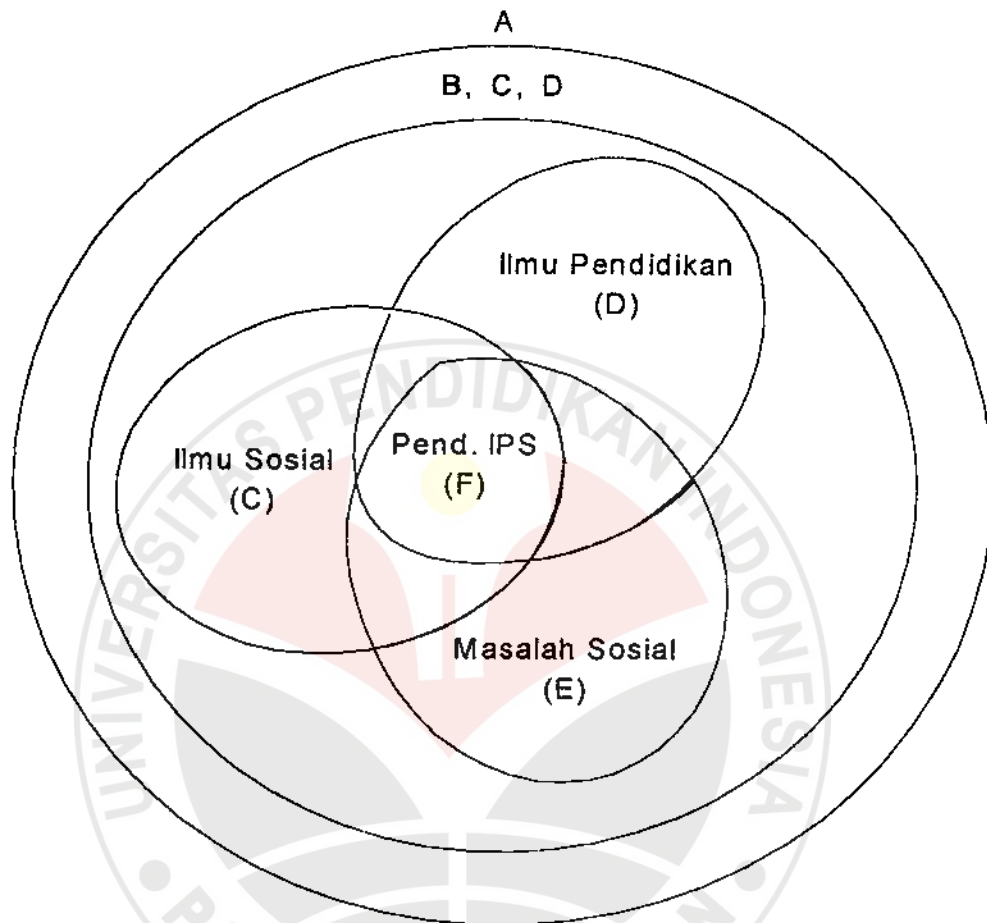
Perlakuan salah kepada anak adalah tindakan dari keluarganya atau lingkungannya yang berakibat negatif terhadap fisik, psikis dan mental anak. Perlakuan salah ini berbentuk perlakuan tidak wajar secara fisik, emosi dan seksual atau psikologis yang menyebabkan anak menderita baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan atau perlakuan salah ini misalnya penelantaran baik fisik, sosial, psikologis dan emosional, pemukulan, perkosaan, penamparan, pembentakan, pengurangan dan sebagainya.

Anak jalanan merupakan salah satu jenis anak rawan semakin meningkat baik secara kuantitatif sebagai dampak krisis multidimensional yang berkepanjangan, di samping masalah-masalah sosial lainnya seperti narkoba, kenakalan remaja, kriminalitas dan kerusuhan. Unicef memperkirakan jumlah anak jalanan pada tahun 1999 sekitar 50.000 orang. Keberadaan mereka telah dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai suatu bentuk gangguan. Permasalahan ini juga sangat memprihatinkan karena penyandanginya adalah anak yang masih membutuhkan perlindungan lingkungan sosial guna tumbuh kembangnya secara wajar.

Kedudukan Pendidikan Ilmu Sosial ada di antara singgungan Ilmu Sosial, Ilmu

Pendidikan dan Masalah Sosial bisa dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1 : KETERKAITAN ANTARA P.IPS
DAN ILMU SOSIAL LAINNYA.



Sumber : Nu' man Somantri, 1999.

Keterangan :

A : Intraceptive Knowledge

BCD : Extraceptic Knowledge

C : Ilmu-ilmu Sosial

D : Ilmu Pendidikan

E : Masalah Sosial

F : Pendidikan IPS

Dalam memecahkan masalah-masalah sosial, profesi Pekerjaan Sosial menggunakan berbagai disiplin ilmu sosial sebagai dasar analisisnya seperti : Filsafat, Sosiologi, Antropologi dan Psikologi. Profesi Pekerjaan Sosial sekalipun masih muda usia pada praktiknya didasari oleh tiga komponen : nilai-nilai, pengetahuan dan sekumpulan alat intervensi (*interventive repertoire*) (Siporin, 1975). Komponen nilai berarti hal-hal yang dianggap baik atau dikehendaki. Dalam pertimbangan nilai masalah benar atau salah tidak dapat ditunjukkan secara empirik. Pumphrey dalam Iskandar (1993) mengemukakan tingkatan nilai : (1) Nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti : demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, perwujudan diri dan penentuan sendiri; (2) Nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok dan masyarakat yang baik; (3) Nilai-nilai tingkat ketiga merupakan nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintahan yang baik dan orang profesional yang baik. Misalnya dapat dipercaya, jujur dan memiliki disiplin diri. Komponen pengetahuan terutama berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam lingkungan sosialnya (*social functioning*) orang, yakni kemampuan orang menghadapi tuntutan lingkungan yang berupa tugas-tugas kehidupan atau peranan-peranan sosial. *Social functioning* atau fungsionalitas sosial di definisikan sebagai suatu pernyataan (pengungkapan) interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya.

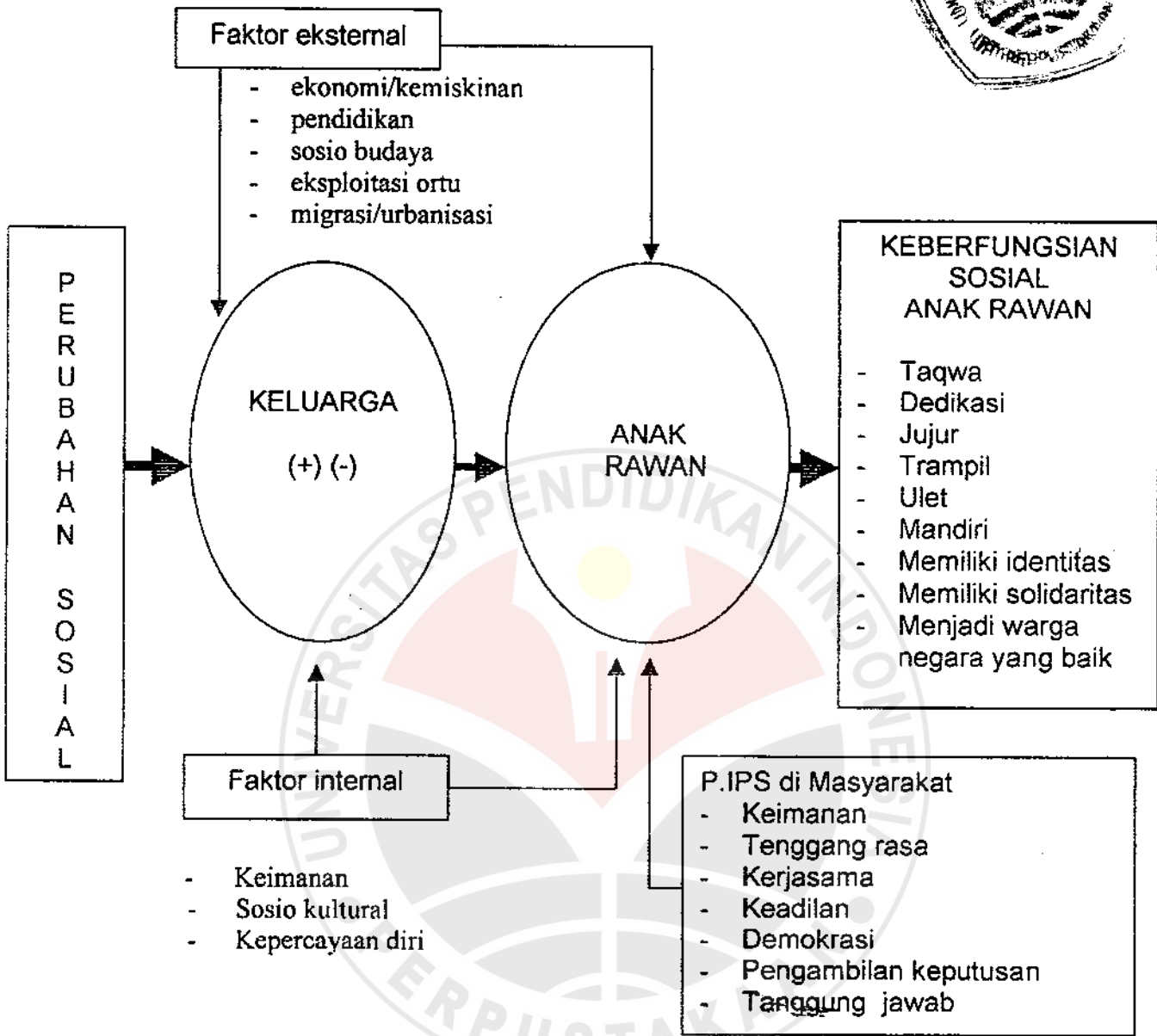
Lingkungan sosial merupakan keadaan yang menyeluruh atau keadaan yang mempengaruhi individu, terdiri dari kombinasi sosial budaya yang mempengaruhi pertumbuhan manusia termasuk tingkah lakunya. Sesuai dengan tujuan pendidikan IPS, profesi pekerjaan sosial mencakup tujuan menjadikan kelompok masyarakat yang dibinanya berkembang sebagai warga negara yang baik (*good citizens*).

Pendekatan generalis dalam praktek pekerjaan sosial mendasarkan pada beberapa alasan : (1) perubahan-perubahan dalam kondisi sosial, yang mengakibatkan pula (2) corak dan jenis permasalahan yang semakin kompleks, (3) pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antara manusia dan lingkungannya dan (4) pengaruh teori-teori sistem terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mendasari pekerjaan sosial, yaitu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk bekerja dengan berbagai corak situasi. Pendekatan generalis berkonsentrasi pada tataran : mikro (perorangan), mezo (kelompok), dan makro (masyarakat).

Kedudukan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ada di antara singgungan Ilmu-Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan dan Masalah Sosial. Variabel-variabel yang saling mempengaruhi fungsionalitas sosial anak jalanan bisa dilihat pada paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2 : KERANGKA BERPIKIR



D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang kondisi kehidupan anak rawan dari berbagai aspek seperti : ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, nilai/norma, kesehatan, pekerjaan, agama dan kebiasaan-kebiasaannya.

2. Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalahnya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya.
4. Untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan yang mungkin butuhkan dan yang telah mereka peroleh baik dari pemerintah maupun masyarakat.
5. Untuk mengetahui bagaimana sumbangan PIPS dalam pemecahan masalah anak rawan.

Manfaat akademis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberi masukan kepada para pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah anak rawan.
2. Memberi masukan kepada peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan.
3. Menemukan model pendekatan yang tepat bagi anak rawan dalam implementasi pendidikan IPS di masyarakat.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Berikut adalah beberapa kunci yang perlu di definisikan secara operasional:

1. **Pendekatan terpadu** : adalah sebuah model pendekatan penanganan masalah sosial dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial melalui integrated knowledge system yang dimulai dari persepsi yang holistik (menyeluruh) terhadap anak jalanan. Pendekatan ini melibatkan seluruh sistem yang terkait dengan anak jalanan seperti, keluarga, teman sebaya, kelompok, masyarakat dan organisasi-organisasi.

2. **Anak rawan** : adalah anak usia 6 –18 tahun yaitu golongan anak yang dipandang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus seperti : mereka yang terpaksa bekerja, dan khususnya yang bekerja dalam kondisi kerja membahayakan jiwa dan raganya, anak yang mengalami perlakuan salah atau eksploitasi seksual, dan anak yang kehilangan apakah sementara atau selamanya pengasuhan orang tua, seperti anak jalanan, serta mereka yang menjadi korban dari sistem peradilan yang masih belum memadai.
3. **Pendidikan IPS** : adalah disiplin ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan pendidikan; yang dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana intervensi dalam menuntun anak rawan menjadi warga negara yang baik, mampu menolong diri sendiri, mampu mengambil keputusan dan mandiri.
4. **Pekerjaan Sosial** : disiplin ilmu sosial terapan (bagian dari PIPS di masyarakat) yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, baik secara sendiri maupun dalam kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi sosialnya, melalui kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang diarahkan kepada relasi sosial mereka, sehingga membentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kegiatan atau upaya-upaya ini dapat digolongkan ke dalam tiga fungsi yaitu : pemulihan (restorasi) kapasitas yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individual maupun sosial, serta pencegahan terhadap disfungsi sosial.